



## Tata Kelola Transportasi di DIY Harus Segera Dibenahi

**YOGYA, TRIBUN** - Kepadatan kendaraan, minimnya lahan parkir, serta konektivitas transportasi yang belum terintegrasi secara optimal, menjadi benang kusut transportasi di DIY. Tantangan tersebut diperparah dengan lonjakan mobilitas wisatawan dan warga lokal yang lebih memilih kendaraan pribadi.

Pemerintah daerah bersama DPRD DIY dan Dinas Perhubungan DIY berupaya keras merumuskan solusi jangka panjang melalui penataan infrastruktur, perubahan kebijakan transportasi, serta edukasi publik tentang pentingnya pergeseran pola pikir dari "kendaraan sebagai kebutuhan" menuju "transportasi sebagai layanan".

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro, menegaskan, DIY harus segera membenahi tata kelola transportasinya. "Wilayah DIY ini sempit, tetapi volume kendaraan luar biasa banyak. Setiap musim liburan, Yogyakarta seperti kehilangan kapasitas menampung mobilitas warganya sendiri. Ini

menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dijawab, bukan hanya dengan infrastruktur fisik, tetapi dengan perubahan pola pikir," ujarnya dalam *podcast* bersama *Tribun Jogja*.

Nur menggarisbawahi bahwa pembangunan jalan dan fasilitas transportasi tidak bisa hanya menjadi proyek tahunan tanpa kesinambungan. "Kalau kita bicara soal transportasi, kita tidak cukup hanya memperbaiki jalan. Kita butuh sistem transportasi yang mendukung ekosistem: terminal, stasiun, halte, dan moda transportasi umum yang andal dan nyaman," ujarnya.

Ia mencontohkan, kesiapan menghadapi dua gerbang tol baru yang akan menghubungkan Yogyakarta dari timur dan utara. "Bayangkan nanti ketika tol langsung tembus ke Jogja, orang dari Jakarta bisa sampai dalam waktu lima jam saja. Ini akan mengubah arus masuk kendaraan. Kalau jalan provinsi dan kabupaten tidak siap sebagai penopang, kita akan menghadapi kemacetan siste-



TRIBUN JOGJA/HANIF SURYO  
**DIALOG** - Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro dan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub DIY Sumaryoto saat menjadi narasumber dalam podcast bertema "Mengurai Benang Kusut Transportasi Jogja".

mik," ujarnya.

**Rasio kendaraan tinggi**

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub DIY Sumaryoto, menambahkan bahwa berdasarkan data tahun 2024, DIY memiliki rasio kepemilikan

kendaraan 79 per 100 penduduk, jauh di atas rata-rata nasional 57 kendaraan. Di Kota Yogyakarta, angkanya mencapai 147 kendaraan per 100 orang, atau hampir dua kendaraan per penduduk. "Masalahnya bukan hanya

jumlah kendaraan, tetapi rasio terhadap panjang jalan. DIY mencatatkan 894 kendaraan per kilometer, angka ini lebih tinggi dari Jakarta sekalipun. Bali yang juga destinasi wisata, hanya mencatat 91 kendaraan per kilometer," terang Sumaryoto.

Dampak ekonominya pun tak kecil. "Kementerian Perhubungan memperkirakan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Indonesia mencapai Rp 77 triliun per tahun, dengan kerugian terbesar berasal dari tiga hal yakni pemborosan BBM, kerusakan teknis kendaraan, dan biaya kesehatan akibat polusi udara," papar Sumaryoto.

Di tengah kemacetan, persoalan parkir menjadi pemicu utama stagnasi lalu lintas di kawasan pusat kota, terutama Malloboro. Sumaryoto menegaskan bahwa kawasan Malloboro tidak memiliki lahan parkir di sepanjang jalannya. Seluruh sistem parkir disediakan di "strip-strip" atau kawasan penyangga seperti Kemandan, Ngabean, Taman Budaya,

dan beberapa titik lain.

"Yang terjadi sekarang, banyak pengunjung tetap mencoba masuk ke Malloboro dengan harapan bisa parkir. Padahal tidak ada tempat. Mereka akhirnya mutermuter, menciptakan kepadatan baru. Ini harus dihentikan. Kalau mau ke Malloboro, parkir di luar lalu gunakan Trans Jogja. Tarifnya cuma Rp3.000, bisa sampai depan Malloboro tanpa stres," ungkapnya.

Pemerintah DIY juga menyiapkan strategi jangka panjang, termasuk pembatasan bus pariwisata agar tidak masuk Malloboro, serta penyediaan kantong parkir di Terminal Gwangan dan Bandara VIA. Bus wisata hanya boleh drop-off dan dilarang parkir di pusat kota.

"Ke depan, akan ada shuttle dari Gwangan ke pusat kota. Ini juga menjadi bagian dari kebijakan Pak Gubernur untuk meredistribusi aktivitas wisata. Jangan hanya di Malloboro, tetapi ke kawasan lain seperti eks-Pura Wisata," ujar Sumaryoto. **(han/ord)**

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005